

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui program pembinaan keterampilan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Pradini Sisworo (2013), yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembinaan Warga Binaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah terdapat tahap awal yang disebut perencanaan pembinaan yaitu tahap identifikasi potensi narapidana. Pembinaan yang dilakukan dibagi menjadi dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan keterampilan. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi disesuaikan dengan jenis materi dan jenis pembinaan yang dilakukan, metode yang diberikan berupa metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Media yang digunakan berupa buku. Evaluasi kegiatan juga dilakukan agar narapidana dapat lanjut ke tahap pembinaan berikutnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pembinaan yang diteliti secara umum atau tidak spesifik dan lokasi penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlela (2014), yang berjudul “Pemberdayaan Narapidana dalam Bidang Keterampilan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta)”. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberdayaan mencakup strategi, metode,

materi, dan media pemberdayaan. Partisipasi narapidana yang ditunjukkan oleh narapidana yang tergabung dalam kegiatan pemberdayaan keterampilan meliputi keseriusan yaitu keterlibatan secara fisik, mental, dan pikiran, juga kedisiplinan dengan mentaati peraturan selama mengikuti kegiatan kerja. Hasil pemberdayaan keterampilan berupa barang yang diproduksi sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah meneliti keterampilan secara umum dan lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anang Sugeng Cahyono (2014), yang berjudul “Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kals IIB Tulungagung”. Hasil dari penelitian ini adalah pihak LP berusaha merubah *mindset* dan karakter dengan dua bidang pembinaan, pertama yaitu kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, jasmani, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua pembinaan kemandirian melalui keterampilan yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuan seperti menjahit, sablon, seni lukis, seni ukir kayu, membuat wayang kulit. Strategi pengembangan program pemberdayaan warga binaan dilakukan melalui pelaksanaan kemitraan (kerjasama). Perbedaan penelitian ini terdapat di fokus penelitian yaitu pemberdayaan dan pengembangan keterampilan, selain itu penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nursiyah (2017), yang berjudul “Pemberdayaan Narapidana Melalui Pengembangan Agribisnis Sayuran Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Hui Bandar”. Hasil dari penelitian ini adalah Pihak lapas mengadakan rapat perencanaan program untuk membahas kurikulum pembelajaran, meliputi jadwal kegiatan, pembiayaan, bahan dan alat yang dibutuhkan, serta menetapkan monitoring dan evaluasi. Proses pelaksanaannya WBP dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan tujuan untuk mengajarkan sikap bertanggung jawab, disiplin, tekan, jujur, dan inisiatif. Sebelumnya diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk mengenalkan kepada narapidana atau WBP tentang agribisnis. Tanaman yang dibudidayakan adalah kol. Faktor penghambat dari program ini adalah ada yang rajin dan tidaknya narapidana atau WBP, sarana yang rusak, lahan yang kurang subur, pengairannya kurang, dan instruksinya kurang tepat waktu dalam melakukan pemantauan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemberdayaan narapidana melalui program agribisnis, bagaimana narapidana menjalankan tugas yang telah diberikan dan lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Hui Bandar.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Akhyarudin Asadullah yang berjudul “Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Pelatihan Keterampilan Bakery”. Hasil dari penelitian ini adalah Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rutan mengikuti berbagai pelatihan kerja salah satunya bakery yang terdapat 3 indikator pada subjek yaitu pelatihan bakery menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan karakter warga binaan, serta

menghasilkan penghasilan dari pembuatan bakery. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian yaitu pemberdayaan melalui keterampilan bakery dan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Klas I Medaeng Surabaya.

B. Pengertian Pemberdayaan

1. Secara Konseptual

Manusia terlahir dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setiap orang mempunyai skill yang berbeda-beda, dengan skill yang dimiliki mereka dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Memaksimalkan potensi yang ada dalam diri dengan berusaha dan belajar adalah kunci utama bagaimana manusia dapat berkembang dan memperoleh hidup yang lebih baik lagi. Namun ada juga seseorang yang tidak atau kurang dalam memaksimalkan potensi yang ada, atau seseorang yang enggan untuk berusaha dan memilih jalan pintas dengan melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri dan membunuh. Mereka terpaksa melakukan tindakan kriminal demi memenuhi tuntutan ekonomi. Tentu mereka harus berhadapan dengan penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang menjadi tidak berdaya guna dapat disebabkan oleh marginal, ketergantungan pada orang lain atau pemerintah (program bantuan seperti BLT), pendidikan yang rendah, dan tidak adanya akses. Disinilah diperlukan program pemberdayaan.

Empowerment dalam bahasa Inggris merupakan terjemahan dari pemberdayaan dalam bahasa Indonesia. Menurut Roesmidi & Risyanti (2006:03) pemberdayaan ialah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, tentunya hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan diri dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Sedangkan menurut Chamber 1995 (Noor, 2011:88) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment, and sustainable*. Konsep pemberdayaan masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) juga sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Agent of change atau agen perubahan hal yang dilakukan pada klien mereka (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas) adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Nursiyh, 2007:37). Payne (Adi, 2008:78) mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan

terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Berbagai pengertian tentang pemberdayaan yang ada pada intinya Shardlow (Roesmidi & Risyanti, 2006:03) menjelaskan pemberdayaan membahas tentang bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Gagasan ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan Kesejahteraan Sosial dengan nama *Self Determination* yang dikenal sebagai salah satu prinsip dasar dalam bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini pada dasarnya mendorong klien untuk menentukan diri sendiri apa yang harus ia lakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi (Adi, 2008:78). Berbagai konsep pemberdayaan dilakukan apabila klien tidak mau berubah dan tidak ada keinginan maka tidak akan berdampak apa-apa pada kehidupan klien.

Suharto (dalam Suharto, 2006:58-59) beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan yang dilihat dari segi tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yaitu:

- a. Ife (dalam Suharto, 2006:58) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

- b. Parsons, et.al. (dalam Suharto, 2006:58-59) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Swift dan Levin (dalam Suharto, 2006:59) pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Rappaport (dalam Suharto, 2006:59) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Narapidana termasuk bagian dari masyarakat yang menjalani masa hukuman di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ialah salah satu Lapas yang menerapkan pemberdayaan narapidana. Pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah pemberdayaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan yang merupakan usaha atau proses pemberdayaan terhadap pelaku tindak kriminal. Hal ini tercermin melalui program pembinaan kemandirian yang dilakukan dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya dan menyadari kesalahan serta mau memperbaiki diri sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan,

dapat hidup berdampingan dengan masyarakat serta mentaati nilai-nilai yang ada, dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Indikator Keberdayaan

Perlu mengetahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika program pemberdayaan diterapkan, segenap upaya dapat dilakukan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan misalnya memaksimalkan potensi sesuai minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurut Suharto (2014:63-64) keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan merek yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas, dan kekuasaan dengan.

Tabel 1.1 : Indikator Keberdayaan (Suharto, 2014)

| Jenis Hubungan Kekuasaan | Kemampuan Ekonomi | Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan | Kemampuan Kultural dan Politis |
|---------------------------------|---|---|---|
| Kekuasaan didalam: | 1. Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya | 1. Kepercayaan diri dan kebahagiaan 2. Keinginan memiliki kesejahteraan yang | 1. <i>Assertiveness</i> dan otonomi 2. Keinginan untuk menghadapi gender |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah | <p>2. Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</p> <p>3. Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat</p> | <p>setara dan keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain</p> <p>3. Keinginan untuk mengontrol jumlah anak</p> | <p>termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik</p> <p>3. Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik</p> |
| <p>Kekuasaan untuk:</p> <p>Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah;</p> <p>Meningkatkan kemampuan untuk memperoleh akses</p> | <p>1. Akses terhadap pelayanan keuangan mikro</p> <p>2. Akses terhadap pendapatan</p> <p>3. Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga</p> <p>4. Akses terhadap pasar</p> <p>5. Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak</p> | <p>1. Keterampilan termasuk kemelekan huruf</p> <p>2. Status kesehatan dan gizi</p> <p>3. Kesadaran mengenai dan akses terhadap kesehatan reproduksi</p> <p>4. Ketersediaan pelayanan kesehatan publik</p> | <p>1. Mobilisasi dan akses terhadap dunia luar rumah</p> <p>2. Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan</p> <p>3. Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Kekuasaan atas:</p> <p>Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro;</p> <p>Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut</p> | <p>1. Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan</p> <p>2. Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya</p> <p>3. Kontrol atas asset produktif dan kepemilikan keluarga</p> <p>4. Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar</p> | <p>1. Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana</p> <p>2. Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat</p> | <p>1. Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat</p> <p>2. Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik</p> |
| <p>Kekuasaan dengan:</p> <p>Meningkatnya solidaritas atau</p> | <p>1. Bertindak sebagai model perenan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik, modern</p> | <p>1. Penghargaan tertinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga</p> | <p>1. Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro | 2. Mampu memberi gaji terhadap orang lain 3. Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada kasus terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar, diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro | 2. Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik | 2. Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perilaku salah dalam keluarga masyarakat 3. Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro |
|---|--|---|---|

Apabila dirangkum indikator-indikator pemberdayaan ialah sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu pergi keluar rumah, atau wilayah tempat tinggalnya, seperti fasilitas medis, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas akan dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta

ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli barang-barang sekunder atau tersier. Poin tinggi diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri dan membeli menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relative dan politik: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes seperti gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tabungan, asset produktif. Seseorang akan dianggap memiliki opin lebih apabila memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

C. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Selain sebutan narapidana di dalam UU Pemasyarakatan juga disebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang meliputi narapidana itu sendiri, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (Pujileksono, 2017:128). Menurut pasal 1 Ayat 8 yang dimaksud Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LP Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LP Anak paling lama sampai berumur 18 tahun

Klien Pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Maka yang dimaksud Warga Binaan Pemasyarakatan ialah narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan pembinaan di Lapas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Poernomo (Pujileksono, 2017:129) narapidana adalah seorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan

selama waktu tertentu ia diproes dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam menjalankan aktifitas pembinaan diwajibkan memakai kaos berwarna biru tua yang dibelakangnya bertuliskan WBP yang dicetak berwarna putih dan kaos biru muda untuk seseorang yang berstatus tahanan yang dibelakangnya bertuliskan TAHANAN. Tahanan ialah seseorang yang berperkara dengan hukum, menjadi tahanan (polisi, Kejaksaan) dan belum mendapatkan vonis dari hakim atau seseorang yang sudah divonis oleh hakim tetapi melakukan banding dan kasasi (Pujileksono, 2017:130). Seragam narapidana ini selain untuk membedakan antara WBP dengan tamping, petugas, dan pengunjung, juga sebagai media kontrol sosial dan media pencegahan pelarian narapidana yang menyamar sebagai tamu yang berkunjung.

Narapidana yang telah hilang kemerdekaannya dan berada dalam lembaga pemasyarakatan juga tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara. Penelitian yang dilakukan Utami pada tahun 2017 menjelaskan bahwa hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, dan harta benda, yang dibawah kekuasaannya, serta bentuk rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat (1) tentang pengesahan *International Covenant on Civil and*

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Oleh karena itu narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi terlepas dari perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu menurut Sanarr (Pujileksono, 2017:137) hak narapidana meliputi:

1. *Access to Court* (Narapidana dapat melakukan penuntutan ke pengadilan atas perlakuan LP yang dialaminya)
2. *Protection from cruel and unusual punishment* (Tingkat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan kondisi keseharian atau perlakuan dalam LP)
3. *Civil rights* (Hak korespondensi dan melakukan aktivitas ibadah)
4. *Proection of rights in decisions when adverse consequences are possible* (Terkait dengan persoalan penerapan disiplin dalam LP; kehadiran petugas netral, pencatatan yang baik tentang fakta (kekerasan) yang mendasari penjatuhan disiplin kepada narapidana; narapidana yang menghadapi prosedur disiplin diperbolehkan menghadirkan saksi atau dokumen untuk membela diri).

Hak narapidana juga diatur dalam UU Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) 12/1995, sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat (PB)
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB)
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Konsep Pembinaan Kemandirian

Masuknya narapidana di lapas dilatar belakangi oleh perkara atau hal yang berbeda-beda. Begitu juga dengan latar belakang pekerjaan atau profesi yang beragam, mulai dari dokter, pengusaha, buruh, hingga PNS. Tak jarang sebelum masuk lapas seseorang memiliki keahlian yang bisa jadi itu adalah pekerjaannya, contohnya dalam bidang menjahit, memasak, salon, dan masih banyak lagi. Ketika ia berhadapan dengan hukum dan menjalani masa hukuman di lapas seorang narapidana mendapatkan pembinaan khususnya pembinaan kemandirian atau keterampilan.

Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa intelektual, sikap, perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan adalah proses atau cara agar lebih baik atau sempurna. Salah satu cara untuk melakukan pemberdayaan ialah melalui pembinaan. Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan sebutan pemasyarakatan, dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Menurut UU Pemasyarakatan Pasal 7 Ayat (1) petugas pemasyarakatan ialah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 dalam UU Pemasyarakatan ialah membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pentingnya pembinaan juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan yang menyatakan narapidana wajib mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan berupa ketrampilan kerja dan latihan kerja.

Menurut Chaplin (Abati 2017:17) kemandirian berasal dari kata *independence* yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Hal ini dapat diartikan seseorang dapat menyelesaikan sesuatu dengan kemampuan yang dimiliki tanpa bergantung pada orang lain. Tujuan kemandirian ialah individu memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tanpa melibatkan orang lain (Abati 2017:19).

Dalam Lembaga Pemasyarakatan petugas pembinaan berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Narapidana dan Kepala Bidang Kegiatan Kerja. Pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan, dan kemandirian. Pembinaan kemandirian dengan memberikan berbagai pelatihan kepada warga binaan.

Program-program kemandirian yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang meliputi rajut, bakery, salon, menjahit, membuat kecap dan masih banyak lagi. Agar lebih luas dan berkembang pihak lapas juga berkolaborasi dengan pihak ketiga. Hasil pembinan kemandirian yang dilakukan warga binaan memiliki nilai jual, contohnya ialah kue, produk rajut, dan barang-barang kerajinan lainnya seperti penebah, dan breyen. Narapidana tentunya mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

E. Lembaga Pemasyarakatan

Penjara (*prison*) yang kini berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang di singkat LP atau Lapas adalah tepat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menteri kehakiman yaitu bapak Sahardjo yang pertama kali menyampaikan istilah pemasyarakatan dan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kependidikan yang diselenggarakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang dulu disebut departemen kehakiman) yang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3 diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Penghuni lembaga pemasyarakatan meliputi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tahanan, pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan baik narapidana maupun tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan atau dikenal dengan istilah sipir. Fungsi sistem pemasyarakatan ialah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada tahun 1968, menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat (Sisworo, 2013:23). Oleh karena itu narapidana dididik melalui beberapa program guna menyiapkan ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak bisa dilepaskan dari tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum (Pujileksono, 2017:137).

Fungsi Lapas sebagai penegak hukum sangat ditentukan dari pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang baik dan bersih tentu akan membuat pengguna layanan baik narapidana maupun masyarakat akan merasa nyaman. Pentingnya zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM). Pelayanan yang terhindar dari praktik-praktik curang atau ilegal tentu akan mempengaruhi semua sistem termasuk pelayanan pembinaan yang diberikan kepada narapidana.

F. Motivasi Kerja

1. Pengertian Motivasi Kerja

Melakukan suatu pekerjaan harus didasari dengan semangat dan rasa tanggung jawab. Semangat yang ditimbulkan dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau instansi. Sebaliknya apabila karyawan atau pegawai

melakukan pekerjaan tanpa adanya semangat maka mengakibatkan suatu perusahaan atau instansi mengalami kemunduran atau stagnan. Semangat dapat timbul dengan adanya motivasi dan motivasi timbul karena ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Semangat tersebut dapat diartikan sebagai motifasinya dalam menyelesaikan pekerjaan (motivasi kerja).

Motivasi berasal dari bahasa Latin “*Movere*” yang artinya dorongan atau menggerakkan. Menurut Yorks (Andjarwati, 2015:46) motivasi ialah kekuatan dalam diri untuk mendorong manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan dasarnya. Dorongan yang ada pada manusia satu dengan manusia yang lainnya berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam dalam bekerja. Dessler (Andjarwati, 2015:46) menyatakan bahwa kebanyakan psikolog meyakini semua motivasi berasal dari suatu ketegangan yang terjadi jika satu atau lebih kebutuhan yang penting tidak terpenuhi. Maka dari itu kebutuhan yang tidak terpenuhi yang akan menjadi sumber dari motivasi dan sebaliknya kebutuhan yang telah terpenuhi tidak akan menciptakan ketegangan oleh karena itu tidak timbul motivasi.

Kuatnya motivasi seseorang tergantung pada pandangan tentang betapa kuatnya keyakinan yang terdapat dalam dirinya bahwa ia akan dapat mencapai apa yang diusahakan untuk dicapai (Siagian, 1989:180). Hal ini dapat diartikan bahwa daya penggerak atau pendorong yang memotivasi semangat kerja karyawan atau pegawai tergantung dari harapan yang akan diperoleh mendatang, jika harapan itu menjadi kenyataan maka karyawan atau pegawai akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya.

2. Fungsi Motivasi Kerja

Motivasi menimbulkan kelakuan dan mempengaruhi serta merubah kelakuan (Sanjaya, 2018: 24). Berikut fungsi motivasi:

- a. Mendorong timbulnya perilaku atau perbuatan, tanpa adanya motivasi tidak akan timbul tindakan atau perbuatan.
- b. Motivasi sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Motivasi sebagai penggerak, artinya besar kecilnya motivasi menentukan cepat atau lambat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

3. Teori Motiasi Kerja

Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan). Maslow meyakini bahwa manusia bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang atau memiliki tingkatan. Sistem hirarki kebutuhan meliputi lima kategori mulai dari kebutuhan paling rendah yang harus terpenuhi lebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Berikut lima tingkatan kebutuhan menurut Maslow:

- a. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan yang harus dipenuhi meliputi makanan, air, tempat berlindung, pakaian.

- b. Kebutuhan Rasa Aman

Perlindungan terhadap ancaman yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan.

c. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan akan rasa cinta, rasa kasih dan memiliki serta diterima dalam pergaulan. Apabila dua kebutuhan diatas sudah terpenuhi maka seseorang akan sadar perlu adanya teman.

d. Kebutuhan Harga Diri

Kebutuhan dan keinginan akan penilaian mantap, rasa hormat diri, penghargaan dari orang lain.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kecenderungan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan potensi untuk mencapai prestasi kerja.

